

MANFAAT PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN GERAKAN BURUH KONTEMPORER

*Michele Ford*¹

Dalam konteks studi kontemporer, pendekatan sejarah bukan berarti memusatkan perhatian pada masa lalu, melainkan mengembangkan sikap kritis terhadap sejarah perburuhan dan dampaknya pada perkembangan masa kini. Di Indonesia, dengan perubahan peta hubungan industrial yang dimulai pada masa kepresidenan Habibie, sudah saatnya hubungan industrial dan institusi gerakan buruh kontemporer dikaji secara lebih serius dengan memakai pendekatan sejarah yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis.

Kebanyakan pakar perburuhan tidak menganggap sejarah sebagai sesuatu yang penting dalam penelitiannya. Walaupun dibahas, sejarah biasanya ditempatkan sebagai 'pelengkap' atau 'latar belakang', bukan sebagai unsur pokok dalam analisisnya. Resiko yang paling menonjol bagi penulis semacam ini adalah analisis yang kurang tajam karena kebiasaan menerima begitu saja 'fakta' yang disajikan laporan sejarah tanpa bertanya tentang teori atau asumsi apa yang membentuk fokusnya. Apalagi banyak pengamat perburuhan yang menulis buku dan artikel tentang hubungan industrial atau gerakan buruh di negara berkembang pada masa lalu bukan hanya sebagai peneliti, melainkan juga pejabat penasehat pemerintah dan pelaku hubungan industrial di negara-negara tersebut (Hess, 1997:225).² Untuk mengatasi masalah ini, sejarah *penulisan* studi hubungan industrial dan gerakan buruh seharusnya menjadi pertimbangan untuk penulis studi kontemporer yang ingin melatarbelakangi studinya dengan sejarah.

Walaupun masalah historiografi ini cukup rawan, ada beberapa resiko yang lebih mendasar kalau sejarah tidak dianalisis dengan kritis oleh pengamat perburuhan kontemporer. Bagaimana orang yang keahliannya bukan dalam bidang sejarah mengembangkan sikap kritis ini? Dengan menyadari kaitan antara masa lalu dan masa kini; dengan mengetahui sedikit tentang hubungan antara teori sosial yang dipakai sekarang dan pengalaman sejarah; dan dengan selalu bertanya tentang dasar 'syarat kesignifikanan' yang dipakai dalam analisisnya. Catatan metodologi ini dimulai dengan membahas masalah batas disiplin dan implikasinya bagi pemakaian sejarah dalam studi kontemporer. Bagian kedua membicarakan perkembangan bidang sejarah perburuhan itu sendiri dan pengaruh pendekatan sejarah perburuhan 'baru' terhadap penulisan studi perburuhan kontemporer di negara berkembang diuraikan secara ringkas. Bagian ketiga membahas nasib studi institusi dalam pendekatan tersebut, lalu diskusi beralih kepada 'syarat kesignifikanan' yang dipakai dalam penulisan studi kontemporer dan kaitannya dengan sejarah. Bagian terakhir merupakan petunjuk sederhana cara mulai mengintegrasikan pendekatan sejarah dalam studi perburuhan kontemporer. Di sini

¹ Peneliti perburuhan dari Universitas Wollongong Australia.

² Contohnya, di Indonesia, karya penulis seperti Tedjasukmana, Hawkins dan Goldberg, yang sering dipakai penulis studi kontemporer tanpa bertanya tentang latar belakang politik dan kepentingan pengamat tersebut. Tedjasukmana pernah menjadi anggota Partai Buruh Indonesia dan Menteri Perburuhan, sedangkan Arthur Goldberg adalah seorang birokrat Departemen Perburuhan Amerika Serikat yang juga sempat menjabat sebagai wakil AFL-CIO di Indonesia (Elliott, 1997:61). Kalau 'fakta' sejarah diterima begitu saja, ada bahayanya kesimpulan pengumpul fakta itu mempengaruhi analisis masalah kontemporer, misalnya pernyataan Hawkins dan Tedjasukmana (yang diangkat sejarawan FBSI/SPSI dan Depnaker) bahwa "serikat buruh pada zaman Orde Lama berpolitik semua" mempengaruhi analisa terhadap bentuk serikat buruh yang cocok di Indonesia pada masa Orde Baru.

penulis menyarankan bahwa pengamat perburuhan memakai pendekatan kritis terhadap sejarah dan terhadap kategori-kategori yang akan dipakai untuk menganalisis peta perburuhan kontemporer.

Antara Studi Kontemporer dan Studi Sejarah

Salah satu ciri khas studi perburuhan yang sering dikemukakan ialah jurang pemisah antara studi kontemporer dan studi sejarah. Kebanyakan peneliti yang berangkat dari pendekatan sosiologi, antropologi, atau pun politik tidak terlalu memperhatikan masalah sejarah, sedangkan sejarawan sering 'alergi' terhadap masalah kontemporer dan terhadap teori sosial yang dikembangkan dalam disiplin lain. Dikotomi antara ilmu perburuhan dan sejarah perburuhan ini berakar pada masalah disiplin yang lebih luas, yaitu jurang pemisah antara ilmu sosial dan ilmu sejarah, yang telah menarik perhatian teoretikus seperti Burke (Burke, 1992) dan Stedman Jones (Jones, 1976).

Contoh terjelas yang menyangkut masalah perburuhan adalah kekurangan komunikasi dan kerja sama antar ahli ilmu hubungan industrial dan ahli sejarah perburuhan (ilmu hubungan industrial merupakan ilmu sosial antardisiplin, yang meliputi ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum, sedangkan sejarah perburuhan merupakan cabang ilmu sejarah). Menurut Brody, seorang sejarawan perburuhan di Amerika Serikat, jurang pemisah antara studi hubungan industrial dan sejarah perburuhan terdiri dari tiga unsur: politik penulis (sejarawan perburuhan biasanya lebih ke kiri); sikap terhadap pentingnya sejarah; dan sikap terhadap pemakaian teori dan model analisis (pendekatan hubungan industrial lebih banyak membahas dan memakai teori secara eksplisit). Dalam rangka diskusi ini, unsur keduanya yang paling menonjol. Kata Brody,

Bagi ahli ilmu sosial, sejarah merupakan alat yang bisa dipakai atau ditinggal, tergantung gunanya untuk mengerti masa sekarang. Seorang sejarawan tidak bisa sefleksibel itu...baginya, masa lalu, secara definisi, tidak pernah tidak relevan. Dan masa sekarang—seberapa jauh sebaiknya sejarawan dipengaruhinya... merupakan pertanyaan yang sulit dijawab (1989:15).

Upaya mengatasi dikotomi ini bukan berarti bahwa setiap ahli ilmu sosial harus memasukkan analisis sejarah ke dalam setiap tulisannya, atau pun setiap ahli sejarah harus mengaitkan studi sejarahnya dengan masa sekarang. Hal yang dibutuhkan adalah penyesuaian yang lebih halus, yaitu renungan akan kategori analisis yang dipakai baik dalam studi kontemporer maupun studi sejarah.

Antara Sejarah Perburuhan Gaya 'Lama' dan 'Baru'

Sebelum pengaruh sejarah terhadap kategori yang dipakai penulis studi perburuhan kontemporer bisa dijelaskan dengan baik, perbedaan pendekatan yang terdapat pada ilmu sejarah perburuhan itu sendiri sebaiknya diselidiki. Pendekatan pasca-strukturalis — seperti pendekatan Foucault (Foucault, 1970; Rabinow, 1984) — telah mempengaruhi beberapa penulis sejarah perburuhan di Eropa dan di Amerika Serikat.³ Akan tetapi, kebanyakan sejarawan yang menulis tentang perburuhan di negara-negara berbahasa Inggris (termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan sebagainya) dan di negara pasca-kolonial (termasuk Indonesia), memakai salah satu dari dua pendekatan terhadap sejarah perburuhan, yaitu pendekatan 'lama' dan pendekatan 'baru'.

Sejarah perburuhan 'lama' merupakan sejarah institusi perburuhan, terutama sejarah serikat buruh. Seperti dijelaskan oleh McKibbin, sejarah perburuhan klasik

biasanya tentang serikat buruh (atau jenis pekerjaan yang memungkinkan pembentukan serikat buruh dengan mudah) dan hubungan industrial, yang

³ Untuk diskusi tentang pengaruh Foucault dan pendekatan diskursif terhadap sejarah perburuhan, lihat Belchem and Kirk (1997); Frader (1995); Hall (1988); Scott (1987) dan (Stedman Jones, 1983).

seringkali berarti perselisihan industrial dan partai politik yang dibentuk oleh serikat buruh, atau terikat pada serikat buruh atau kaum buruh industrial yang merupakan anggota serikat buruh tersebut (1994: 34).

Ketika mengomentari penulisan sejarah perburuhan di Australia, Robin Gollan (seorang sejarawan perburuhan Australia yang cukup terkenal), mencatat bahwa "cara sejarawan perburuhan [gaya 'lama'] menganggap kaum buruh hampir sama dengan cara kaum buruh dianggap oleh sejarawan ekonomi, yaitu hanya sebagai buruh" (Gollan, 1999:230). Maksudnya, identitas buruh yang begitu kompleks disederhanakan sehingga buruh hanya dilihat dalam kaitan dengan pekerjaannya dan organisasinya. Ada beberapa kritik lain yang sering dilontarkan, yang juga terkait dengan sempitnya fokus sejarah perburuhan 'lama'. Di antaranya, karena pendekatan ini menekankan politik dan struktur institusi, cerita dan 'suara' buruh sendiri sering hilang. Juga, karena fokusnya pada serikat buruh dan industri-industri yang banyak pekerjanya sudah menjadi anggota serikat buruh, pekerja dalam industri yang berbeda strukturnya (seperti industri jasa) dan pekerja non-tradisional (seperti perempuan yang bekerja paruh waktu) sering diabaikan.

Dalam rangka mengatasi kelemahan sejarah perburuhan 'lama', pada tahun 1960-an beberapa sejarawan perburuhan di negara industrial mengalihkan fokusnya dari serikat buruh kepada tempat kerja buruh, politik akar rumput, kampung buruh, dan budaya kaum buruh. Sejarah perburuhan 'baru' ini dipelopori beberapa sejarawan Inggris termasuk E.P. Thompson.⁴ Pergeseran dari 'sejarah perburuhan' kepada 'sejarah buruh' telah membuka bidang studi yang penting, yang membenahi banyak kekurangan yang terdapat dalam sejarah perburuhan klasik. Selain lebih terfokus pada kehidupan dan pengalaman buruh sendiri, menurut para sejarawan feminis, sejarah perburuhan model 'baru' lebih mungkin—dan lebih mampu—mencakup sejarah buruh perempuan, buruh migran, dan buruh anak daripada paradigma 'lama', yang cenderung memusatkan perhatiannya pada sejarah buruh laki-laki yang bekerja di sektor formal (Frader, 1995:215).

Banyak peneliti organisasi buruh di negara berkembang terkungkung di dalam paradigma sejarah perburuhan 'lama', seperti dijelaskan sebelumnya. Sejarah institusional ini disenangi pengamat hubungan industrial dan gerakan buruh karena data tentang serikat buruh, lembaga bipartit dan tripartit, dan kebijaksanaan formal pemerintah terhadap masalah perburuhan, relatif mudah disusun dan dapat dibandingkan dengan negara lain.⁵ Meskipun begitu, fokus sejarah perburuhan 'baru' cukup berpengaruh terhadap studi perburuhan kontemporer di negara-negara berkembang, yang relatif sedikit tenaga kerjanya bekerja sebagai pekerja kerah biru (atau buruh) di sektor formal. Akibatnya, sudah banyak pengamat perburuhan yang mengalihkan perhatiannya dari pasar tenaga kerja dan serikat buruh kepada proses yang lebih luas, yaitu proletarianisasi (Southall, 1988:3). Pinches, misalnya, telah mengemukakan beberapa pertanyaan yang cukup tajam tentang kategori analisis dan kerumitan ekonomi kota di negara-negara berkembang. Berdasarkan studinya di Filipina, ia mengatakan bahwa sebuah pengkajian ulang yang kritis dibutuhkan karena "perbedaan-perbedaan konseptual yang sering dipakai untuk memisahkan tenaga kerja kota dunia ketiga ke dalam kategori kaum buruh dan miskin kota tidak cocok di dunia berkembang" (Pinches, 1987:103). Sebagai contoh masalah tersebut, Pinches menunjukkan ketidakjelasan antara pekerjaan yang digaji dan yang tidak digaji dalam konteks urban di negara-negara berkembang, yaitu ketidakjelasan tentang siapa yang memegang kontrol terhadap pekerjaan orang yang bekerja untuk diri sendiri; ketidakjelasan tentang hubungan majikan-buruh di sektor informal; dan ketidakjelasan batas antara kerja paksa dan kerja gajian (Pinches, 1987:117-118). Pertanyaan semacam

⁴ Sepengetahuan saya tidak ada penulis Indonesia secara eksplisit mengakui diri sebagai pengikut sejarah perburuhan 'gaya baru', tetapi ada banyak yang mengutip E.P. Thompson dan memakai wawasannya, termasuk Andriyani (1996), Hadiz (1997) dan Kusyuniati (1998).

⁵ Lihat misalnya, koleksi Frenkel (1993a).

ini jelas penting di Indonesia yang memiliki studi perburuhan yang cenderung cukup ketat memisahkan buruh industrial dan sektor informal.⁶

Nasib Institusi Perburuhan dalam Paradigma Sejarah Perburuhan 'Baru'

Sulitnya menerapkan teori dan kategori institusional perburuhan Barat di negara berkembang sudah lama dicatat. Hanya beberapa tahun setelah konsep 'negara berkembang' itu sendiri menjadi populer, Kerr dan Siegel mengingatkan para pakar perburuhan bahwa teori gerakan buruh Barat tidak dirancang untuk konteks masyarakat non-kapitalis, ekonomi pra-industri, atau pun jenis kapitalisme yang berbeda dengan kapitalisme ala Barat. (Kerr and Siegel, 1955; Perlman, 1960:343-344) Meskipun begitu, model hubungan industrial dan serikat buruh Barat tetap menjadi pedoman bagi penganut model '*convergence*' yang disusun oleh Kerr, Dunlop, Harbison, dan Meyers dalam buku terkenalnya, *Industrialism and Industrial Man* (Kerr et al., 1962).⁷ Walaupun jumlah teori tentang keserikatburuhan dan hubungan industrial di negara berkembang tumbuh dengan pesat setelah tahun 1960-an,⁸ model Kerr dkk. dan model sejenisnya tetap berpengaruh (Towers, 1996:4).⁹ Akibatnya, para ekonom, pengamat hubungan industrial, dan pakar gerakan buruh lainnya masih cenderung terfokus pada persentase pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh, operasi serikat pekerja/buruh, atau hubungan antara industrialisasi dan hubungan industrial di negara berkembang.¹⁰

Kalau paradigma sejarah perburuhan 'lama' ini tidak mengakui keistimewaan konteks negara berkembang, bagaimana nasib studi institusi perburuhan dalam paradigma sejarah perburuhan 'baru'? Pada umumnya, studi yang dipengaruhi E.P. Thompson, dan penganjur pendekatan sejarah perburuhan 'baru' lainnya, cenderung mengabaikan atau menyingkani organisasi formal seperti serikat buruh.¹¹ Dua pakar yang telah membahas masalah nasib studi institusi perburuhan dalam era berjayanya sejarah perburuhan 'baru' ini ialah Kimeldorf dan Zeitlin. Menurut Kimeldorf, studi serikat buruh tetap penting. Katanya, daripada mencampakkan metodologi lama begitu saja, sebaiknya wawasan sejarah perburuhan 'baru' diterapkan pada studi serikat buruh (Kimeldorf, 1991). Bagi Zeitlin, orang yang mempelajari hubungan sosial buruh di dalam dan di luar tempat kerjanya tanpa memperhatikan sistem hubungan industrial yang ada seperti katak dalam tempurung, karena institusi formal (pemerintah, alat sistem produksi, dan serikat buruh) merupakan struktur yang cukup menentukan hubungan sosial tersebut (Zeitlin, 1987). Sayangnya, saran Kimeldorf dan Zeitlin belum banyak ditanggapi.

Bagaimana di Indonesia? Setelah tahun 1990-an, ada cukup banyak disertasi dan artikel tentang proses proletarianisasi dan masyarakat buruh, terutama proletarianisasi perempuan (Andriyani, 1996; Athreya, 1998; Hancock, 1998; Mather, 1983; Saptari, 1995; Wolf, 1992). Walaupun studi ini studi kontemporer, fokus sejarah perburuhan 'baru'—yaitu

⁶ Untuk contoh studi yang berusaha meliputi pelaku berbagai macam kerja, lihat Athreya (1998) atau Jellinek (1991).

⁷ Menurut model '*convergence*' ini, elit pendukung modernisasi akan berusaha mengikuti pola industri dan hubungan industri yang terdapat di 'negara maju'.

⁸ Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, Basu Sharma mengidentifikasi "paling sedikit...tujuh paradigma yang berbeda" tentang hubungan industrial di negara berkembang (Sharma, 1996:6). Pendekatan yang memakai lebih dari satu pendekatan terhadap hubungan industrial di negara berkembang juga sering ditemukan. Lihat, misalnya kata pengantar buku Frenkel tentang hubungan industrial pada sembilan negara di wilayah Asia-Pasifik (Frenkel, 1993b).

⁹ Dalam kata pengantarnya pada nomor istimewa *Industrial Relations Journal* tentang hubungan industrial, demokrasi, dan pembangunan, Towers mencatat bahwa model '*convergence*' tetap mendominasi perdebatan tentang hubungan industrial di negara berkembang (Towers, 1996:4). Komentarnya dibuktikan oleh beberapa tulisan baru, termasuk kata pengantar sebuah koleksi tentang hubungan kerja di tujuh negara, termasuk Indonesia (Bamber and Ross, 2000:5).

¹⁰ Lihat, misalnya Frenkel (1993a) dan Kuruvilla (1996) dan Kuruvilla dan Venkataratnam (1996).

¹¹ Untuk contoh pemaduan metodologi sejarah perburuhan baru dan fokus institusional, lihat karya John Ingleson yang memakai pendekatan sejarah perburuhan 'gaya baru' tetapi tetap terfokus pada serikat buruh (Ingleson 1986).

kehidupan dan pengalaman buruh sendiri—tercermin di dalamnya. Oleh karena itu, institusi, seperti serikat buruh, hanya disinggung sejauh institusi tersebut menyentuh kehidupan sehari-hari buruh. Ada juga studi tentang serikat buruh yang berusaha membicarakan masalah proletarianisasi yang ditulis pada tahun 1990-an (Hadiz, 1997; Hikam, 1995; Kusyuniati, 1998). Tetapi, studi tersebut belum mampu membuka ruang diskusi teoretis tentang sifat keserikatburuhan di Indonesia karena pada saat fokusnya beralih kepada serikat buruh, kategori analisis yang dipakainya tetap memakai serikat buruh Barat sebagai modelnya tanpa diuji dulu apakah cocok untuk konteks Indonesia.

Salah satu contoh kekurangan diskusi teoretis ini adalah penolakannya terhadap status serikat buruh alternatif Orde Baru dan perbedaan antara serikat buruh alternatif ini dan LSM perburuhan. Bagi penulis seperti Eldridge, Uhlin, dan Aspinall (yang fokus utamanya pada peranan LSM dan gerakan buruh dalam demokratisasi), SBM-SK dan SBSI jelas berbeda sekali dengan LSM perburuhan karena struktur keanggotaannya. Eldridge memberi penekanan pada perbedaan dalam bentuk organisasi dan peranan LSM sebagai katalis pengorganisasian (Eldridge, 1995:111-114). Menurut Uhlin, walaupun SBM-SK dan SBSI didirikan oleh aktivis kelas menengah, organisasi tersebut tetap berbeda dari LSM perburuhan karena mereka menuju gerakan massal atau serikat buruh nasional (Uhlin, 1997:119). Bagi Aspinall, perbedaannya berdasarkan upaya serikat buruh alternatif untuk berfungsi sebagai serikat buruh independen yang tidak terkendalikan oleh pemerintah, sedangkan LSM merupakan semacam 'bidan' dalam proses organisasi buruh (Aspinall, 2000:140-141). Penulis yang memakai perspektif proletarianisasi (yang banyak dipengaruhi pendekatan antropologi dan sejarah perburuhan 'baru') juga mengakui perbedaan antara serikat buruh alternatif dan LSM perburuhan. Bagi Athreya, misalnya, perbedaannya karena serikat buruh alternatif berusaha menentang struktur Hubungan Industrial Pancasila dengan berusaha mendaftar sebagai serikat buruh resmi (Athreya, 1998:46).¹² Sebaliknya, bagi Vedi Hadiz dan Sri Kusyuniati, tidak ada batas antara serikat buruh alternatif dan LSM perburuhan—menurutnya, serikat buruh alternatif hanya LSM perburuhan dengan nama yang berbeda. Syarat utama yang mendasari pertimbangan mereka ialah komposisi dan fungsi serikat buruh 'benaran', yaitu latar belakang kelas pendirinya; keterbatasan aksesnya terhadap buruh di tempat kerja (Kusyuniati, 1998:283, 319-320; Hadiz, 1997:136).

Masalah Kategori Analisis sebagai Masalah Syarat Kesignifikanan

Masalah kategori analisis ini bisa dimengerti sebagai masalah 'syarat kesignifikanan'. Syarat kesignifikanan itu adalah syarat yang dipakai untuk menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Seperti dicatat Hyman,

Setiap penjelasan 'fakta' hubungan industrial berdasarkan prinsip pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan 'syarat kesignifikanan'. Bahasa kita, dengan mengelompokkan fenomena unik ke dalam kategori umum, mengandung definisi tentang persamaan dan perbedaan yang kita anggap relevan [atau tidak relevan] (1994:167).

Kalau sejarawan tidak secara eksplisit menyadari 'syarat kesignifikanan', yang dibentuk oleh pengalaman pribadinya dan pendekatan teori yang dianutnya, keunikan sejarah bisa hilang.¹³ Bagi penulis studi perburuhan kontemporer, ada resiko 'syarat kesignifikanan' yang berdasarkan pengalaman sejarah—apalagi sejarah negara lain—dipakai tanpa diinterogasi dulu (seperti kasus definisi serikat buruh yang dijelaskan sebelumnya). Masalah ini sering mewarnai kajian proletarianisasi, hubungan industrial, dan gerakan buruh di negara berkembang. 'Syarat kesignifikanan' yang mencerminkan pengalaman di Eropa atau di Amerika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20—tentang siapa yang

¹² Walaupun Nori Andriyani dan Ratna Saptari tidak membahas perbedaan antara serikat buruh alternatif dan LSM perburuhan secara eksplisit, mereka juga membedakannya (Andriyani, 1996) (Saptari, 1995)

¹³ Lihat buku Lowenthal yang berjudul *The Past is a Foreign Country* (Lowenthal, 1985).

dianggap 'proletar', tentang jenis organisasi mana yang dapat dianggap sebagai organisasi buruh dan tentang ciri-ciri serikat buruh—dipakai oleh ahli ilmu hubungan industrial dan sejarawan gerakan buruh dalam lingkungan yang sebenarnya sangat berbeda. Sedangkan kategori 'kelas pekerja' pun belum tentu cocok di negara berkembang. Seperti dikemukakan Hull,

konsep 'kelas pekerja' berlaku untuk orang yang pekerjaannya diatur dengan cara tertentu. Berbeda dengan kaum tani atau pedagang swasta, kelas pekerja tergantung pada gaji atau upah borongan untuk penghidupannya. Mereka orang yang dipekerjakan, yang pada umumnya tergantung pada orang lain untuk menyediakan modal dan bahan mentah serta memasarkan produk yang dihasilkannya... Definisi klasik 'kelas pekerja' berdasarkan pengalaman Revolusi Industri di Eropa dan eksperimen politis pengorganisasian pekerja pada abad ke-20...Negara berkembang seperti Indonesia merupakan konteks yang cukup berbeda, dan oleh karena itu, banyak definisi klasik tidak begitu cocok untuk kenyataan kontemporer [di negara berkembang tersebut] (1994:2).

Kesimpulan: Saran Bagi Pengamat Perburuhan yang Ingin Memakai Pendekatan Sejarah

Analisis kritis tentang pengkategorian organisasi, jenis pekerjaan, dan jenis pekerja dibutuhkan supaya keunikan perburuhan Indonesia tidak dihilangkan ketika memakai teori internasional tanpa terlebih dulu diuji kecocokannya. Dengan menyadari dasar kategori yang dipakai dan pengaruh perbedaan antara pendekatan 'lama' dan 'baru' dalam penulisan sejarah perburuhan terhadapnya, penganalisis perburuhan kontemporer dapat mempertimbangkan warisan sejarah dengan lebih seksama. Pesannya jelas. *Pertama*, jangan menerima catatan sejarah begitu saja tanpa menanyakan latar belakang penulis dan konteks historiografinya. *Kedua*, sadarlilah metodologi sejarah dan interaksinya dengan metodologi disiplin ilmu lain. *Ketiga*, ujilah dasar 'syarat kesignifikanan' yang dipakai untuk menganalisis masalah perburuhan kontemporer. Dengan langkah seperti ini, analisis masalah kontemporer akan lebih tajam karena tidak disalaharakan oleh 'hukuman sejarah'.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Nori. 1996. "The Making of Indonesian Women Worker Activists." Tesis M.A. yang belum diterbitkan. St Johns: Memorial University of Newfoundland.
- Aspinall, Edward. 2000. "Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. Canberra: The Australian National University.
- Athreya, Bama. 1998. "Economic Development and Political Change in a Workers' Community in Jakarta, Indonesia." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. University of Michigan.
- Bamber, Greg, dan Peter Ross. 2000. "Industrialisation, Democratisation and Employment Relations in the Asia-Pacific." Dalam *Employment Relations in the Asia-Pacific*, Greg Bamber, Funkoo Park, Changwon Lee, Peter Ross, dan Kaye Broadbent (ed.). St Leonards: Allen and Unwin: Hal. 3-19.
- Belchem, John, dan Neville Kirk. 1997. "Introduction." Dalam *Languages of Labour*, J. Belchem and N. Kirk (ed.). Aldershot: Ashgate. Hal.1-8.
- Brody, David. 1989. "Labor History, Industrial Relations, and the Crisis of American Labor." *Industrial and Labor Relations Review* 43:7-18.
- Burke, Peter. 1992. *History and Social Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Eldridge, P. 1995. *Non-Government Organisations and Democratic Participation in Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Elliott, Jan. 1997. "Bersatoe Kita Berdiri Bertjerai Kita Djatoeh: Workers and Unions in Indonesia: Jakarta 1945-1965." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. Kensington: University of New South Wales.

- Ford, Michele. 2001. "The Intellectual in Indonesian Labour History and Historiography." Makalah yang disampaikan di CLARA Workshop on Indonesian Labour History, Bali, 4-8 December 2001.
- Foucault, Michel. 1970. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. London and New York: Tavistock Publications.
- Frader, Laura. 1995. "Dissent Over Discourse: Labor History, Gender, and the Linguistic Turn." *History and Theory* 34:213-231.
- Frenkel, S. (Ed.). 1993a. *Organised Labour in the Asia Pacific Region: A Comparative Study of Trade Unionism in Nine Countries*. Ithaca: ILR Press.
- Frenkel, Stephen. 1993b. "Theoretical Frameworks and the Empirical Contexts of Trade Unionism." Dalam *Organised Labor in the Asia-Pacific Region: A Comparative Study of Trade Unionism in Nine Countries*, Stephen Frenkel (ed.). Ithaca: International Labour Relations Press. Hh. 3-54
- Gollan, Robin. 1999. "Writing Labour History." Dalam *Australian Labour History Reconsidered*. D. Palmer, R. Shanahan, dan M. Shanahan. (eds.) Unley: Australian Humanities Press. Hal.230-233
- Hadiz, Vedi R. 1997. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London dan New York: Routledge.
- Hall, Stuart. 1988. "The Toad in the Garden: Thatcherism among the Theorists." Dalam *Marxism and the Interpretation of Culture*, C. Nelson dan L. Grossberg (eds.). London: Macmillan. Hal.35-73
- Hancock, Peter James. 1998. "Industrial Development in Indonesia, Development for Whom? A Case Study of Women who Work in Factories in Rural West Java." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. Perth: Edith Cowan University.
- Hess, Michael. 1997. "Understanding Indonesian Industrial Relations in the 1990s." *Journal of Industrial Relations* 39:33-51.
- Hikam, Muhammad. 1995. "The State, Grass-Roots Politics and Civil Society : A Study of Social Movements Under Indonesia's New Order." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. University of Hawaii.
- Hull, Terrence. 1994. "Workers in the Shadows: A Statistical Wayang." Dalam *Indonesia's Emerging Proletariat: Workers and their Struggles*, David Bouchier (ed.). Clayton: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University. Hal.1-17
- Hyman, Richard. 1994. "Theory and Industrial Relations." *British Journal of Industrial Relations* 28:225-247.
- Ingleson, John. 1986. *In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926*. Singapore: Oxford University Press.
- Jellinek, Lea. 1991. *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*. Sydney: ASAA/Allen and Unwin.
- Kerr, C., J. Dunlop, F. Harbison, dan C. Meyers. 1962. *Industrialism and Industrial Man*. London: Heinemann.
- Kerr, Clark, dan Abraham Siegel. 1955. "The Structuring of the Labor Force in Industrial Society: New Dimensions and New Questions." *Industrial and Labor Relations Review* 8:151-168.
- Kimeldorf, H. 1991. "Bring Unions Back In (Or Why We Need a New Old Labor History)." *Labor History* 32:104-128.
- Kuruvilla, S. 1996. "Linkages between Industrialization Strategies and Industrial Relations/Human Resource Policies: Singapore, Malaysia, The Philippines, and India." *Industrial and Labor Relations Review* 49:635-658.
- Kuruvilla, S., dan C. Venkataratnam. 1996. "Economic Development and Industrial Relations: The Case of South and Southeast Asia." *Industrial Relations Journal* 27:9-24.
- Kusyuniati, Sri. 1998. "Strikes in 1990-1996: An Evaluation of the Dynamics of the Indonesian Labour Movement." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. Melbourne: Swinburne University of Technology.

- Lowenthal, David. 1985. *The Past is a Foreign Country*. Cambridge, New York dan Melbourne: Cambridge University Press.
- Mather, C. 1983. "Industrialization in the Tangerang Regency of West Java: Women Workers and the Islamic Patriarchy." *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 15:2-17.
- McKibbin, Ross. 1994. "Is it Still Possible to Write Labour History?" Dalam *Challenges to Labour History*, T. Irving (ed.). Sydney: University of New South Wales Press. Hal. 34-41
- Perlman, Mark. 1960. "Labor Movement Theories: Past, Present, and Future." *Industrial and Labor Relations Review* 13:338-348.
- Pinches, M. 1987. "'All That We Have is Our Muscle and Sweat', The Rise of Wage Labour in a Manila Squatter Community." Dalam *Wage Labour and Social Change: The Proletariat in Asia and the Pacific*, M. Pinches dan S. Lakha (eds.). Clayton: CSEAS Monash. Hal.103-140.
- Rabinow, Paul (Ed.). 1984. *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- Saptari, Ratna. 1995. "Rural Women to the Factories: Continuity and Change in East Java's Kretek Cigarette Industry." Disertasi PhD yang belum diterbitkan. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Scott, Joan. 1987. "'L'Ouvriere! Mot Impie, Sordide...': Women Workers in the Discourse of French Political Economy, 1840-1860." Dalam *The Historical Meanings of Work*, P. Joyce (ed.). Cambridge University Press: Cambridge. Hal. 119-142.
- Sharma, Basu. 1996. *Industrial Relations in ASEAN: A Comparative Study*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Southall, Roger. 1988. "Introduction." Dalam *Labour and Unions in Asia and Africa: Contemporary Issues*, Roger Southall (ed.). London: Macmillan. Hal.1-31.
- Stedman Jones, Gareth. 1976. "From Historical Sociology to Theoretical History." *British Journal of Sociology* 27:295-305.
- Stedman Jones, Gareth. 1983. *Studies in English Working Class History 1932-1982*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Towers, Brian. 1996. "Industrial Relations, Economic Development and Democracy in the 21st Century: Report and Commentary." *Industrial Relations Journal* 27:4-8.
- Uhlen, Anders. 1997. *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. Richmond: Curzon Press.
- Wolf, D. 1992. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Zeitlin, Jonathan. 1987. "From Labour History to the History of Industrial Relations." *Economic History Review* 40:159-184.